

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN WONOSOBO

2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN WONOSOBO

2023

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wonosobo 2023

Volume 1, 2024

ISBN :
Nomor Publikasi : 33070.24017
Katalog : 7102025.3307
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : vii + 48 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

TIM PENYUSUN

Pengarah:
Dr. Mustaqim, S.ST,S.E, M.Si

Penanggung Jawab:
Gigih Agus Susiyanto, S.ST, M.E.K.K

Naskah dan Tata Letak:
Gigih Agus Susiyanto, S.ST, M.E.K.K,
Devita Wulandari, S.ST

Pemeriksa Tabel:
Gigih Agus Susiyanto, S.ST, M.E.K.K,

Gambar Kulit:
Gigih Agus Susiyanto, S.ST, M.E.K.K,

<https://wonosu.krab.kab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah 'Azza Wa Jalla, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya sehingga Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wonosobo 2023 dapat terbit sesuai jadwal yang ditentukan. Publikasi ini merupakan publikasi edisi pertama, yang menampilkan hasil penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Wonosobo dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

IKK merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan dengan kota acuan, yaitu kota Makassar. IKK tahun 2023 menjadi salah satu komponen yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024. Penghitungan IKK tahun 2023 diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) Triwulan III dan IV tahun 2022 serta Triwulan I dan II tahun 2023.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini. Saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Wonosobo, Agustus 2024
Kepala BPS Kabupaten Wonosobo



Mustaqim

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Metode Pengumpulan Data	5
1.4 Konsep dan Definisi	6
1.5 Cakupan Publikasi	9
BAB II	13
2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	13
2.2 Paket Komoditas IKK	14
2.3 Diagram Timbang IKK	17
2.4 Metode Penghitungan IKK	17
2.5 IKK 2023	19
2.6 Dana Alokasi Umum (DAU)	20
2.7 Konsep Definisi Legenda Peta Kawasan Hutan	21
2.8 Konsep Definisi Peta Topografi	22
BAB III	26
3.1 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi di Indonesia	26
3.2 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	29
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2023	27
Tabel 2.	Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023	29

<https://wonosobokab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kawasan Hutan di Jawa	23
Gambar 2.	Topografi Pulau Jawa.....	23
Gambar 3.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2023	27
Gambar 4.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	31
Gambar 5.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	32
Gambar 6.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia Tahun 2023 (Kota Makassar=100)	32

<https://wonosobokab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia Tahun 2019 (Kota Semarang=100).....	39
Lampiran 2.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Kota Semarang=100).....	40
Lampiran 3.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia Tahun 2021 (Kota Makassar=100).....	41
Lampiran 4.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia Tahun 2022 (Kota Makassar=100).....	42
Lampiran 5.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia Tahun 2023 (Kota Makassar=100).....	43
Lampiran 6.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Kota Semarang=100).....	44
Lampiran 7.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Kota Semarang=100).....	45
Lampiran 8.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Kota Makassar=100)	46
Lampiran 9.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Kota Makassar=100)	47
Lampiran 10	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Kota Makassar=100)	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2000. Kebijakan ini, diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pula mampu mengatasi masalah perimbangan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan yang terjadi selama ini mampu teratasi, terutama bagi daerah yang relatif tertinggal. Masih adanya ketimpangan daerah dalam suatu wilayah akan mempersulit proses perbaikan pembangunan untuk menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam perumusannya DAU tersebut dibutuhkan salah satu komponen penting selain jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) yaitu Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didapat dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK), yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Survei tersebut

dilakukan 4 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli, Oktober, Januari, April. Data yang dikumpulkan meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi.

IKK adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. SHKK menjadi penting karena untuk menghitung IKK diperlukan data dari survei tersebut termasuk bobot/diagram timbang. IKK merupakan *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, artinya semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Bobot/diagram timbang IKK diperoleh dari *Bill of Quantity* (BOQ). BOQ adalah realisasi pembangunan suatu konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan satuan ukuran luas dari 6 jenis bangunan yang ditentukan.

Keenam jenis bangunan yang dimaksud adalah bangunan tempat tinggal, bangunan gedung kantor, bangunan gedung pendidikan, bangunan jalan, bangunan jembatan, dan bangunan irigasi. Dengan adanya angka IKK dan realisasi APBD sebagai pembentuk modal tetap, maka keterbandingan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah dapat dianalisis dan menjadi acuan untuk pertimbangan kebijakan didepannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab sebagai penyedia data statistik dasar di Indonesia telah melakukan perhitungan IKK sejak tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU tahun 2003 dan berlanjut hingga sekarang. Data IKK tersebut ditujukan untuk melihat tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran/informasi bagi pengguna data tentang perkembangan Indeks yang menggambarkan kondisi kemahalan bahan konstruksi di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2023. Data IKK Kabupaten Wonosobo ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi kebijakan baik yang telah diambil oleh pemerintah maupun pihak swasta, terutama yang berkaitan dengan stabilitas harga di kabupaten ini. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat memberi manfaat bagi para pengguna data dari berbagai kalangan.

1.3. Metode Pengumpulan Data

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 meliputi angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan di BPS Kabupaten/Kota di Kabupaten Wonosobo, serta data prasarana (jalan) yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Wonosobo. Adapun data yang berasal dari instansi terkait, membentuk data sekunder yang setiap tahunnya dikumpulkan melalui Kuesioner Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK).

Penghitungan IKK tahun 2023 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat, dan jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yakni Juli 2022, Oktober 2022, Januari 2023, dan April 2023. Empat periode pencacahan tersebut dilakukan karena periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

1.4. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang terdapat di dalam publikasi ini, antara lain:

1. **Harga Perdagangan Besar** dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya/pedagang lainnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.
2. **HPB Bahan Bangunan/Konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (partai) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan penggunaan bahan bangunan tersebut.
3. **Pedagang Besar (PB)** adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan konstruksi secara partai/grosir atau dalam jumlah besar.
4. **Pedagang Besar Pertama (PB I)** adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil.
5. **Partai/grosir atau dalam Jumlah Besar** yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
6. **Konstruksi** adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi

perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan/perombakan bangunan.

7. **Harga Sewa Alat Berat Konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah unit per jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jas operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki syarat batas umur maksimal 8 tahun.
8. **Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK)** adalah cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota ataupun provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah jenis barang/bahan bangunan dan harga sewa alat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut. TKK menggambarkan perkembangan harga di suatu wilayah pada periode tertentu terhadap harga periode tahun dasar.
9. **Paket Komoditas** adalah sejumlah barang terpilih yang digunakan sebagai komponen penghitungan IKK. Komoditas/jenis barang tersebut dipilih karena andil yang cukup besar dan data harganya lebih mudah dipantau dan mempunyai tingkat keterbandingan antar kabupaten/kota.
10. **Diagram Timbang (DT)** atau bobot yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari DT kelompok jenis bangunan dan DT umum. DT kelompok jenis bangunan digunakan untuk memperoleh nilai TKK masing-masing kelompok jenis bangunan. DT umum

digunakan untuk menghitung IKK umum setelah diperoleh masing-masing kelompok jenis bangunan.

11. **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)** adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK rata-rata nasional. Sesuai dengan pengertiannya IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodical, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar atau Indeks Harga Konsumen, kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu lokasi pada periode tertentu dibandingkan terhadap tahun dasar.
12. **Responden** adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya serta responden sama untuk setiap periode pencacahan.
13. **Spesifikasi/kualitas Barang** setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka dicari pengganti yang setara.
14. **Tanah Urug, Pasir, Batu Pondasi, dan Batu Split** isian ukuran batu bata/batako per buah yaitu panjang, lebar, tinggi dalam meter.
15. **Batu Bata dan Batako** satuan standar untuk barang-barang ini adalah m³.
16. **Semen Portland dan Cat Emulsi** diutamakan mencacah sesuai merk yang ditentukan, seperti Tiga Roda dan Catylac.
17. **Besi Beton dan Pipa PVC** diutamakan mencacah sesuai merk yang ditentukan yakni Wavin.

18. **Kayu Balok dan Kayu Papan** standar kayu balok atau kayu papan adalah m^3 dan harga kayu per lembar nya.
19. **Kaca dan Kayu Gypsum** mencacah menggunakan merk yang ditentukan dan harga per lembar nya.
20. **Kabel** dicacah dengan harga satuan per rol, bukan per meter. Apabila ditemukan dengan per meter, maka dilakukan konversi sesuai satuan satu rol.

1.5. Cakupan Publikasi

Publikasi ini menyajikan tabulasi data dan deskripsi perkembangan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Wonosobo dan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023.

<https://wonosobokab.bps.go.id>

<https://wonosobokab.bps.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan dan jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan. Lebih lanjut, IKK dapat dikatakan sebagai cerminan dari suatu nilai bangunan atau konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi dibandingkan dengan nilai bangunan atau konstruksi yang sama di suatu kota acuan.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan harga *input* dan yang kedua dengan pendekatan harga *output*.

1. Pendekatan harga *input* yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan, digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*.
2. Pendekatan *output* dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini yaitu dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga kurang sesuai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Dengan pertimbangan ini, disepakati penghitungan IKK menggunakan pendekatan harga *input*.

Dalam penghitungan IKK, diperlukan data/komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan pula suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksnya. Penentuan kota acuan pada penghitungan IKK dilakukan dengan menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/kota se-Indonesia dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK yaitu untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2013-2014 digunakan Kota Samarinda sebagai kota acuan. Tahun 2015-2017 digunakan Kota Surabaya sebagai kota acuan. Tahun 2018-2020 digunakan Kota Semarang sebagai kota acuan, sedangkan kota acuan pada penghitungan IKK 2021 - 2023 adalah Kota Makassar.

2.2 Paket Komoditas IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Pendekatan ini digunakan dalam *International Comparison Programs* (ICP) tahun 2005. Metode pendekatan ini didesain untuk keterbandingan antar wilayah. Dalam metode BOCC, data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi merupakan *output* fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen

kunci dalam proses pendekatan ini yaitu semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan dengan tujuan memberikan perbandingan harga konstruksi antar wilayah yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ). Mengacu pada pendekatan BOCC, paket komoditas IKK didefinisikan sebagai suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan atau konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan atau konstruksi.

IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 5 (lima) jenis kelompok bangunan yaitu

1. Kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal
2. Prasarana pekerjaan umum untuk pertanian; jalan, jembatan, dan pelabuhan
3. Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
4. Bangunan lainnya

Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Adapun klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut sebagai berikut:

- A. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, terdiri atas:
 - i. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun dan perumahan dinas.
 - ii. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
- B. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:

- i. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - ii. Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
- C. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan terdiri dari:
- i. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - ii. Bangunan jalan dan jembatan kereta
 - iii. Bangunan dermaga meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang
- D. Bangunan lainnya, terdiri dari:
- i. Bangunan sipil, pembangunan lapangan olah raga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan permukiman
 - ii. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian meliputi bangunan pengairan dan tempat proses hasil pertanian
 - iii. Bangunan elektrikal meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi
 - iv. Konstruksi telekomunikasi udara meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena
 - v. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api

2.3 Diagram Timbang IKK

Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2022 terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. IKK tahun 2022 menggunakan penimbang *updating Bill of Quantity* (BoQ) sampai tahun 2020. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

2.4 Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK 2020 dilakukan melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_i = \sum_{m=1}^n p_m q_m$$

Keterangan:

- NK_i : Nilai komponen ke-i pada masing-masing sistem bangunan
- p_m : Harga material/upah/sewa alat ke-m
- q_m : Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-m
- n : Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-l

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_i = a_x C_x + f_j P_i + E_{xi}$$

Keterangan:

- NK_i : Nilai Komponen ke-l
- C_x : *Dummy* kabupaten/kota ke-x
- P_i : *Dummy* komponen ke-l suatu sistem/bangunan

ϵ_{xl} : Galat
 α_x dan β_l : Koefisien regresi
 $PPP_{\text{Sistem } k}$ = $\exp(\alpha_x)$

$$PPP_{\text{sistem } k} = \sqrt[n]{\prod_{l=1}^n \frac{NK_{klx}}{NK_{klo}}}$$

Keterangan:

$PPP_{\text{Sistem } k}$: *Purchasing Power Parity* sistem ke-k
 NK_{klx} : Nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kab/kota ke-x
 NK_{klo} : Nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kota acuan
 N : Jumlah komponen dalam suatu sistem

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{\text{bangunan } j} = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n PPP_{\text{sistem } k}^{w_{2k}}}$$

Keterangan:

$PPP_{\text{bangunan } j}$: *Purchasing Power Parity* bangunan ke-j
 n : Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{\text{proyek } i} = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n PPP_{\text{Bangunan } j}^1}$$

Keterangan:

$PPP_{\text{proyek } i}$: *Purchasing Power Parity* bangunan ke-i
 n : Jumlah bangunan dalam suatu proyek

Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding ($C_0 = \text{dummy kota acuan} = 0$). Kota acuan ditetapkan

berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat

<https://wonosobokab.bps.go.id>

distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (PPP_{proyek_i})^{w_{li}} \cdot 100$$

Keterangan:

n : Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota

2.5 IKK 2023

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK 2003-2012 adalah BoQ tahun 2003. Mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2021 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan *updating* BoQ tahun 2020. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 maupun 2012 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan.

IKK tahun 2023 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2022, Oktober 2022, Januari 2023, dan April 2023. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2023 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

Kota acuan pada penghitungan IKK 2023 adalah Kota Makassar. Pada tahun 2018 - 2020 kota acuan adalah Kota Semarang, sebelumnya kota acuan IKK tahun 2015-2017 yaitu Kota Surabaya dan Kota Samarinda untuk IKK 2012-2014. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumberdata.

Pada proses penghitungan IKK tahun 2023, dilakukan penyempurnaan sewa alat berat untuk mendapatkan sewa alat berat murni berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016. Penghitungan sewa alat berat murni dilakukan dengan cara mengeluarkan biaya mobilisasi alat, biaya bahan bakar (solar), biaya pelumas, biaya operator, serta biaya perbaikan dan perawatan dari total biaya sewa alat berat. Penyempurnaan penghitungan sewa alat berat merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas data IKK.

2.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

sebesar 10 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada kabupaten/kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional yaitu minimal sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri *Netto* (PDN *Netto*). Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama.

Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya, tergantung dari hasil hitungan komponen-komponen pembentuk DAU seperti variabel jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU (DAU = 0).

2.7. Konsep definisi legenda peta kawasan hutan (Kementerian Kehutanan)

Danau/Tubuh Air adalah kumpulan air yang besarnya tergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu dan sebagainya, misalnya sungai, rawa, danau dan samudera.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Produksi Konversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Hutan Produksi Terbatas adalah hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah pada umumnya berada di wilayah pegunungan.

Hutan Suaka Alam adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Peta kawasan hutan digunakan sebagai gambaran persebaran hutan di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum adanya kawasan hutan berpengaruh terhadap kelancaran arus distribusi barang dari suatu kabupaten ke kabupaten lainnya sehingga harga suatu komoditi meningkat (IKK tinggi). Hal ini umum terjadi di kabupaten di luar pulau Jawa.

2.8. Konsep definisi peta topografi

Topografi adalah studi mengenai bentuk relief permukaan bumi yang berisi tentang informasi tentang ketinggian permukaantahan pada suatu tempat terhadap permukaan laut, yang digambarkan dengan garis-garis kontur. (sumber: www.wikipedia.org)

Peta topografi ini memberikan gambaran mengenai wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah. Suatu kabupaten yang terletak di pegunungan biasanya memiliki akses distribusi barang yang sulit. Hal ini menyebabkan tingginya harga suatu komoditas di daerah tersebut akibat dari transportasi yang langka. Kondisi ini umum terjadi di kabupaten di luar pulau Jawa. Peta Topografi bersumber dari www.natureearthdata.com.

Gambar 1.
Kawasan Hutan di Jawa



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023
Badan Pusat Statistik

Gambar 2.
Topografi Pulau Jawa



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023
Badan Pusat Statistik

<https://wonosobokab.bps.go.id>

BAB III

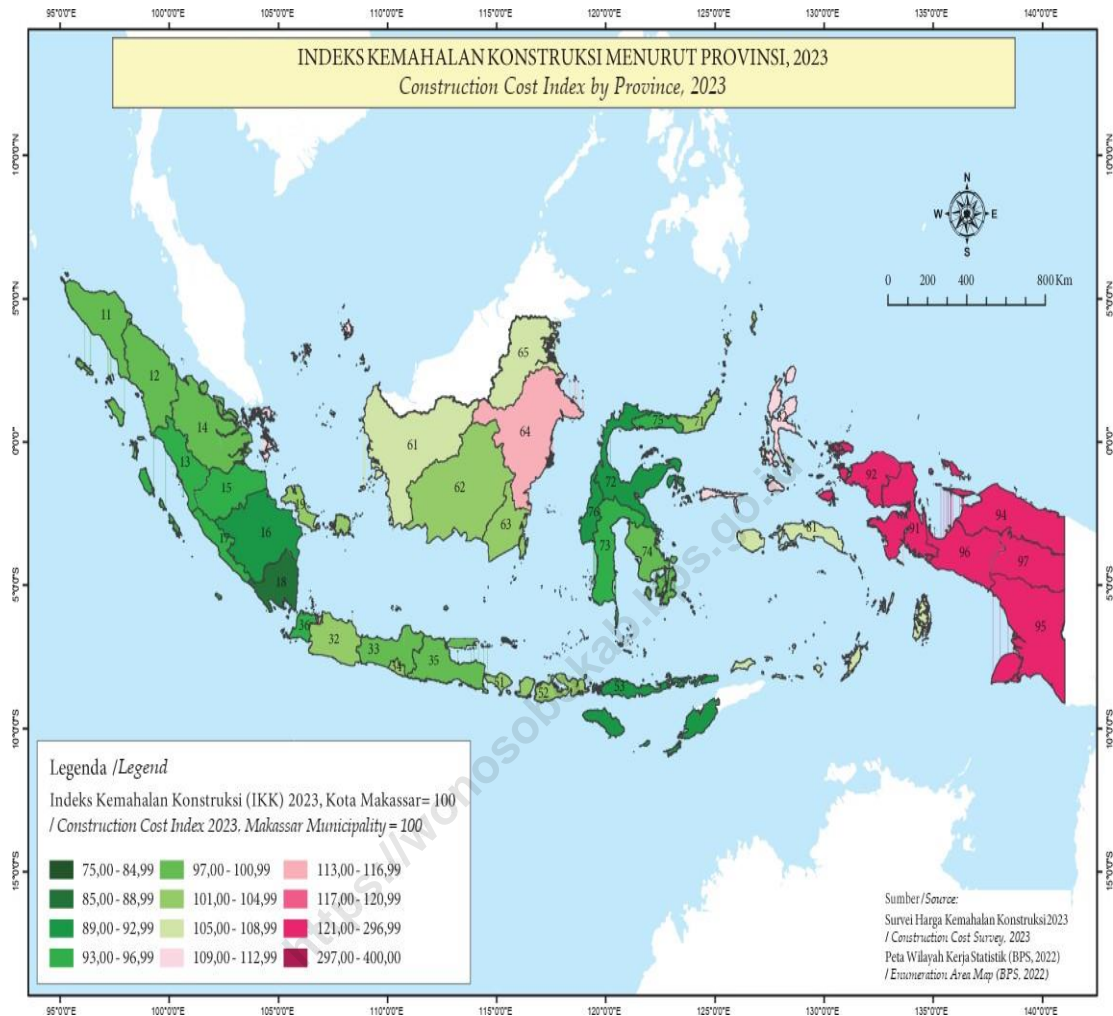
PERKEMBANGAN INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

3.1 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi di Indonesia

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Angka IKK yang semakin tinggi menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri. Selengkapnya tentang IKK Provinsi se-Indonesia disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2023



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023
 Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2023, IKK tertinggi tercatat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 251,25 sedangkan IKK terendah tercatat di Provinsi Lampung sebesar 88,65.

Tabel 1.
Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2023

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Provinsi Aceh	97,38
2	1200	Provinsi Sumatera Utara	98,81
3	1300	Provinsi Sumatera Barat	94,15

4	1400	Provinsi Riau	99,06
5	1500	Provinsi Jambi	93,55
6	1600	Provinsi Sumatera Selatan	91,39
7	1700	Provinsi Bengkulu	93,27
8	1800	Provinsi Lampung	88,65
9	1900	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	103,94
10	2100	Provinsi Kepulauan Riau	111,32
11	3100	Provinsi DKI Jakarta	116,73
12	3200	Provinsi Jawa Barat	104,08
13	3300	Provinsi Jawa Tengah	100,19
14	3400	Provinsi DI Yogyakarta	104,46
15	3500	Provinsi Jawa Timur	98,47
16	3600	Provinsi Banten	95,74
17	5100	Provinsi Bali	103,40
18	5200	Provinsi Nusa Tenggara Barat	102,01
19	5300	Provinsi Nusa Tenggara Timur	92,44
20	6100	Provinsi Kalimantan Barat	107,44
21	6200	Provinsi Kalimantan Tengah	104,89
22	6300	Provinsi Kalimantan Selatan	103,25
23	6400	Provinsi Kalimantan Timur	115,58
24	6500	Provinsi Kalimantan Utara	105,21
25	7100	Provinsi Sulawesi Utara	101,62
26	7200	Provinsi Sulawesi Tengah	91,96
27	7300	Provinsi Sulawesi Selatan	95,88
28	7400	Provinsi Sulawesi Tenggara	98,20
29	7500	Provinsi Gorontalo	95,99
30	7600	Provinsi Sulawesi Barat	91,94
31	8100	Provinsi Maluku	108,12
32	8200	Provinsi Maluku Utara	112,70
33	9100	Provinsi Papua Barat	124,26
34	9200	Provinsi Papua Barat Daya	121,87
35	9400	Provinsi Papua	135,56

36	9500	Provinsi Papua Selatan	138,42
37	9700	Provinsi Papua Pegunungan	251,25
38	9600	Provinsi Papua Tengah	215,86

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023
Badan Pusat Statistik

3.2 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

IKK dihitung di 515 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kabupaten/kota yang tercatat memiliki nilai IKK paling tinggi yaitu Kabupaten Puncak dengan IKK sebesar 383,61. Kemudian disusul Kabupaten Intan Jaya sebesar 376,04 serta Kabupaten Puncak Jaya sebesar 351,45. Ketiga kabupaten tersebut terletak di Provinsi Papua. Di sisi lain, nilai IKK terendah tercatat di Kabupaten Belu sebesar 81,39 kemudian disusul Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 82,95, serta Kabupaten Kupang sebesar 83,71, ketiga kabupaten tersebut terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tabel 2.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kode	Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3301	Kab Cilacap	98,21
2	3302	Kab Banyumas	97,20
3	3303	Kab Purbalingga	96,36
4	3304	Kab Banjarnegara	98,54
5	3305	Kab Kebumen	96,33
6	3306	Kab Purworejo	96,39
7	3307	Kab Wonosobo	97,98
8	3308	Kab Magelang	97,34
9	3309	Kab Boyolali	98,60
10	3310	Kab Klaten	97,74

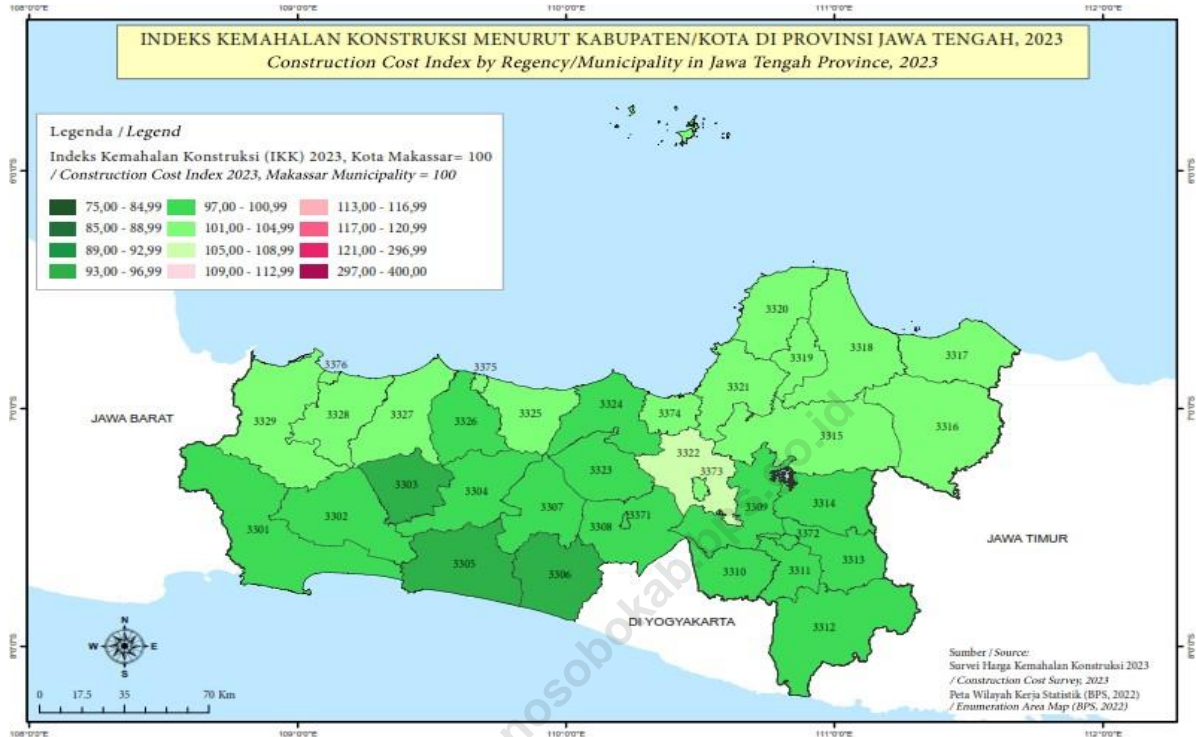
11	3311	Kab Sukoharjo	99,59
12	3312	Kab Wonogiri	97,21
13	3313	Kab Karanganyar	99,41
14	3314	Kab Sragen	97,77
15	3315	Kab Grobogan	101,87
16	3316	Kab Blora	101,25
17	3317	Kab Rembang	101,98
18	3318	Kab Pati	103,48
19	3319	Kab Kudus	103,82
20	3320	Kab Jepara	102,79
21	3321	Kab Demak	102,86
22	3322	Kab Semarang	105,40
23	3323	Kab Temanggung	98,40
24	3324	Kab Kendal	100,18
25	3325	Kab Batang	101,68
26	3326	Kab Pekalongan	100,88
27	3327	Kab Pemasang	102,58
28	3328	Kab Tegal	101,19
29	3329	Kab Brebes	102,18
30	3371	Kota Magelang	98,63
31	3372	Kota Surakarta	99,69
32	3373	Kota Salatiga	102,59
33	3374	Kota Semarang	102,94
34	3375	Kota Pekalongan	101,54
35	3376	Kota Tegal	103,15

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023
Badan Pusat Statistik

Nilai IKK Kabupaten Wonosobo sebesar 97,98 menunjukkan tingkat kemahalan barang/jasa konstruksi di Kabupaten Wonosobo 2,02 persen lebih murah dari kota acuan (Kota Makassar). Dengan kata lain, jika untuk membangun sebuah gedung besar di Kota Makassar dibutuhkan biaya 100 milyar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di Kabupaten Wonosobo

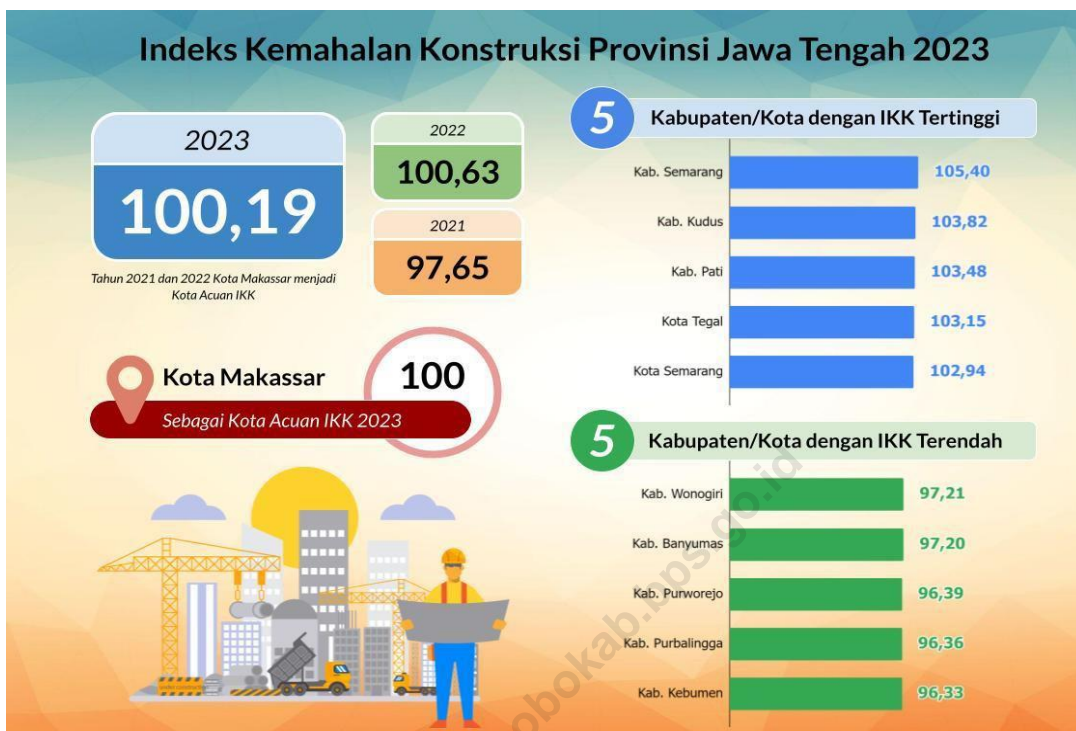
akan memerlukan biaya sebesar 97,98 milyar rupiah.

Gambar 4.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023
Badan Pusat Statistik

Gambar 5.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2023 (Kota Makssar=100)



Gambar 6.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi
di Indonesia Tahun 2023 (Kota Makssar=100)

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) CONSTRUCTION COST INDEX (CCI)

2023

5 Kabupaten/Kota dengan IKK terendah Regencies/Municipalities with The Lowest CCI



5 Kabupaten/Kota dengan IKK tertinggi Regencies/Municipalities with The Highest CCI

COVER LAMPIRAN

<https://wonosobokab.bps.go.id>

Lampiran 1.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi
di Indonesia Tahun 2019 (Kota Semarang=100)

Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)
1100	Aceh	98,69
1200	Sumatera Utara	102,79
1300	Sumatera Barat	93,72
1400	Riau	94,92
1500	Jambi	94,38
1600	Sumatera Selatan	94,50
1700	Bengkulu	94,74
1800	Lampung	88,84
1900	Bangka Belitung	101,27
2100	Kepulauan Riau	128,34
3100	DKI Jakarta	114,06
3200	Jawa Barat	103,03
3300	Jawa Tengah	99,93
3400	DI Yogyakarta	103,42
3500	Jawa Timur	103,68
3600	Banten	95,84
5100	Bali	119,10

Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)
5200	Nusa Tenggara Barat	98,76
5300	Nusa Tenggara Timur	99,03
6100	Kalimantan Barat	111,53
6200	Kalimantan Tengah	101,90
6300	Kalimantan Selatan	100,90
6400	Kalimantan Timur	114,37
6500	Kalimantan Utara	112,11
7100	Sulawesi Utara	108,32
7200	Sulawesi Tengah	91,98
7300	Sulawesi Selatan	97,34
7400	Sulawesi Tenggara	101,45
7500	Gorontalo	97,45
7600	Sulawesi Barat	92,27
8100	Maluku	123,02
8200	Maluku Utara	119,11
9100	Papua Barat	132,67
9400	Papua	218,59

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2019
 Badan Pusat Statistik

Lampiran 2.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi
di Indonesia Tahun 2020 (Kota Semarang=100)

Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)
1100	Aceh	96,38
1200	Sumatera Utara	99,84
1300	Sumatera Barat	92,96
1400	Riau	95,72
1500	Jambi	90,35
1600	Sumatera Selatan	92,69
1700	Bengkulu	91,78
1800	Lampung	88,67
1900	Bangka Belitung	101,90
2100	Kepulauan Riau	121,50
3100	DKI Jakarta	116,84
3200	Jawa Barat	103,93
3300	Jawa Tengah	97,31
3400	DI Yogyakarta	102,29
3500	Jawa Timur	102,44
3600	Banten	97,05
5100	Bali	115,04

Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)
5200	Nusa Tenggara Barat	99,13
5300	Nusa Tenggara Timur	97,95
6100	Kalimantan Barat	110,92
6200	Kalimantan Tengah	99,55
6300	Kalimantan Selatan	100,32
6400	Kalimantan Timur	109,69
6500	Kalimantan Utara	109,90
7100	Sulawesi Utara	104,11
7200	Sulawesi Tengah	90,74
7300	Sulawesi Selatan	95,11
7400	Sulawesi Tenggara	101,09
7500	Gorontalo	94,12
7600	Sulawesi Barat	89,48
8100	Maluku	124,38
8200	Maluku Utara	120,52
9100	Papua Barat	129,66
9400	Papua	208,90

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2020
 Badan Pusat Statistik

Lampiran 3.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi
di Indonesia Tahun 2021 (Kota Makassar=100)

Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)
1100	Aceh	99,03
1200	Sumatera Utara	101,63
1300	Sumatera Barat	94,77
1400	Riau	94,85
1500	Jambi	92,76
1600	Sumatera Selatan	91,58
1700	Bengkulu	94,42
1800	Lampung	92,57
1900	Bangka Belitung	101,21
2100	Kepulauan Riau	116,80
3100	DKI Jakarta	121,42
3200	Jawa Barat	102,60
3300	Jawa Tengah	97,65
3400	DI Yogyakarta	100,31
3500	Jawa Timur	100,80
3600	Banten	97,64
5100	Bali	103,17

Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)
5200	Nusa Tenggara Barat	101,93
5300	Nusa Tenggara Timur	93,58
6100	Kalimantan Barat	111,45
6200	Kalimantan Tengah	101,47
6300	Kalimantan Selatan	99,25
6400	Kalimantan Timur	109,81
6500	Kalimantan Utara	106,00
7100	Sulawesi Utara	104,43
7200	Sulawesi Tengah	90,50
7300	Sulawesi Selatan	96,84
7400	Sulawesi Tenggara	99,38
7500	Gorontalo	95,07
7600	Sulawesi Barat	90,72
8100	Maluku	124,61
8200	Maluku Utara	112,31
9100	Papua Barat	130,59
9400	Papua	207,11

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021
 Badan Pusat Statistik

Lampiran 4.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi
di Indonesia Tahun 2022 (Kota Makassar=100)

Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)
1100	Aceh	110,59
1200	Sumatera Utara	103,40
1300	Sumatera Barat	97,66
1400	Riau	99,21
1500	Jambi	96,84
1600	Sumatera Selatan	92,04
1700	Bengkulu	95,65
1800	Lampung	90,46
1900	Bangka Belitung	102,78
2100	Kepulauan Riau	115,97
3100	DKI Jakarta	121,48
3200	Jawa Barat	105,97
3300	Jawa Tengah	100,63
3400	DI Yogyakarta	102,37
3500	Jawa Timur	100,02
3600	Banten	97,72
5100	Bali	104,74

Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)
5200	Nusa Tenggara Barat	104,44
5300	Nusa Tenggara Timur	93,69
6100	Kalimantan Barat	109,37
6200	Kalimantan Tengah	104,77
6300	Kalimantan Selatan	102,26
6400	Kalimantan Timur	115,65
6500	Kalimantan Utara	104,69
7100	Sulawesi Utara	104,74
7200	Sulawesi Tengah	92,50
7300	Sulawesi Selatan	92,55
7400	Sulawesi Tenggara	98,02
7500	Gorontalo	95,28
7600	Sulawesi Barat	87,44
8100	Maluku	107,97
8200	Maluku Utara	110,60
9100	Papua Barat	124,82
9400	Papua	192,57

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022
 Badan Pusat Statistik

Lampiran 5.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi
di Indonesia Tahun 2023 (Kota Makassar=100)

Kode	Provinsi	IKK	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1100	Aceh	97,38	6100	Kalimantan Barat	107,44
1200	Sumatera Utara	98,81	6200	Kalimantan Tengah	104,89
1300	Sumatera Barat	94,15	6300	Kalimantan Selatan	103,25
1400	Riau	99,06	6400	Kalimantan Timur	115,58
1500	Jambi	93,55	6500	Kalimantan Utara	105,21
1600	Sumatera Selatan	91,39	7100	Sulawesi Utara	101,62
1700	Bengkulu	93,27	7200	Sulawesi Tengah	91,96
1800	Lampung	88,65	7300	Sulawesi Selatan	95,88
1900	Bangka Belitung	103,94	7400	Sulawesi Tenggara	98,20
2100	Kepulauan Riau	111,32	7500	Gorontalo	95,99
3100	DKI Jakarta	116,73	7600	Sulawesi Barat	91,94
3200	Jawa Barat	104,08	8100	Maluku	108,12
3300	Jawa Tengah	100,19	8200	Maluku Utara	112,70
3400	DI Yogyakarta	104,46	9100	Papua Barat	124,26
3500	Jawa Timur	98,47	9200	Papua Barat Daya	121,87
3600	Banten	95,74	9400	Papua	135,56
5100	Bali	103,40	9500	Papua Selatan	138,42
5200	Nusa Tenggara Barat	102,01	9600	Papua Tengah	215,86
5300	Nusa Tenggara Timur	92,44	9700	Papua Pegunungan	251,25

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023
Badan Pusat Statistik

Lampiran 6.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2019 (Kota Semarang=100)

Kode	Provinsi	IKK	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3301	Kab Cilacap	96,31	3319	Kab Kudus	104,60
3302	Kab Banyumas	96,15	3320	Kab Jepara	110,07
3303	Kab Purbalingga	94,50	3321	Kab Demak	109,46
3304	Kab Banjarnegara	98,39	3322	Kab Semarang	105,27
3305	Kab Kebumen	96,15	3323	Kab Temanggung	101,56
3306	Kab Purworejo	96,57	3324	Kab Kendal	100,83
3307	Kab Wonosobo	100,50	3325	Kab Batang	94,73
3308	Kab Magelang	97,97	3326	Kab Pekalongan	101,02
3309	Kab Boyolali	93,69	3327	Kab Pemasang	97,63
3310	Kab Klaten	95,03	3328	Kab Tegal	98,33
3311	Kab Sukoharjo	98,21	3329	Kab Brebes	103,39
3312	Kab Wonogiri	99,46	3371	Kota Magelang	96,85
3313	Kab Karanganyar	94,62	3372	Kota Surakarta	95,88
3314	Kab Sragen	99,97	3373	Kota Salatiga	102,10
3315	Kab Grobogan	101,11	3374	Kota Semarang	100,00
3316	Kab Blora	103,18	3375	Kota Pekalongan	99,71
3317	Kab Rembang	106,07	3376	Kota Tegal	102,34
3318	Kab Pati	109,22			

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2019
Badan Pusat Statistik

Lampiran 7.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota
Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 (Kota Semarang=100)

Kode	Provinsi	IKK	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3301	Kab Cilacap	94,56	3319	Kab Kudus	100,05
3302	Kab Banyumas	94,82	3320	Kab Jepara	105,25
3303	Kab Purbalingga	90,13	3321	Kab Demak	103,45
3304	Kab Banjarnegara	93,52	3322	Kab Semarang	107,03
3305	Kab Kebumen	94,88	3323	Kab Temanggung	97,90
3306	Kab Purworejo	94,35	3324	Kab Kendal	98,02
3307	Kab Wonosobo	101,78	3325	Kab Batang	94,26
3308	Kab Magelang	93,43	3326	Kab Pekalongan	95,42
3309	Kab Boyolali	90,82	3327	Kab Pemasang	92,98
3310	Kab Klaten	94,75	3328	Kab Tegal	94,30
3311	Kab Sukoharjo	95,41	3329	Kab Brebes	99,64
3312	Kab Wonogiri	95,61	3371	Kota Magelang	94,75
3313	Kab Karanganyar	97,25	3372	Kota Surakarta	97,85
3314	Kab Sragen	98,20	3373	Kota Salatiga	100,48
3315	Kab Grobogan	94,84	3374	Kota Semarang	100,00
3316	Kab Blora	99,39	3375	Kota Pekalongan	96,18
3317	Kab Rembang	102,30	3376	Kota Tegal	101,40
3318	Kab Pati	103,56			

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2020
 Badan Pusat Statistik

Lampiran 8.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota
Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 (Kota Makasar=100)

Kode	Provinsi	IKK	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3301	Kab Cilacap	92,58	3319	Kab Kudus	101,85
3302	Kab Banyumas	92,31	3320	Kab Jepara	101,87
3303	Kab Purbalingga	89,15	3321	Kab Demak	105,79
3304	Kab Banjarnegara	93,14	3322	Kab Semarang	105,45
3305	Kab Kebumen	97,85	3323	Kab Temanggung	97,83
3306	Kab Purworejo	96,31	3324	Kab Kendal	97,43
3307	Kab Wonosobo	98,97	3325	Kab Batang	95,80
3308	Kab Magelang	94,02	3326	Kab Pekalongan	96,00
3309	Kab Boyolali	97,92	3327	Kab Pemasang	97,08
3310	Kab Klaten	95,28	3328	Kab Tegal	97,73
3311	Kab Sukoharjo	95,96	3329	Kab Brebes	98,30
3312	Kab Wonogiri	98,23	3371	Kota Magelang	94,12
3313	Kab Karanganyar	100,96	3372	Kota Surakarta	96,10
3314	Kab Sragen	101,47	3373	Kota Salatiga	99,49
3315	Kab Grobogan	98,81	3374	Kota Semarang	100,23
3316	Kab Blora	96,38	3375	Kota Pekalongan	95,80
3317	Kab Rembang	99,67	3376	Kota Tegal	100,63
3318	Kab Pati	99,51			

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021
 Badan Pusat Statistik

Lampiran 9.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota
Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 (Kota Makasar=100)

Kode	Provinsi	IKK	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3301	Kab Cilacap	98,71	3319	Kab Kudus	103,39
3302	Kab Banyumas	97,40	3320	Kab Jepara	102,88
3303	Kab Purbalingga	97,12	3321	Kab Demak	102,34
3304	Kab Banjarnegara	99,46	3322	Kab Semarang	105,59
3305	Kab Kebumen	97,14	3323	Kab Temanggung	100,67
3306	Kab Purworejo	97,92	3324	Kab Kendal	100,86
3307	Kab Wonosobo	100,55	3325	Kab Batang	101,41
3308	Kab Magelang	97,30	3326	Kab Pekalongan	101,65
3309	Kab Boyolali	100,01	3327	Kab Pemasang	102,62
3310	Kab Klaten	97,32	3328	Kab Tegal	99,97
3311	Kab Sukoharjo	97,21	3329	Kab Brebes	103,12
3312	Kab Wonogiri	98,25	3371	Kota Magelang	97,69
3313	Kab Karanganyar	101,61	3372	Kota Surakarta	102,24
3314	Kab Sragen	99,46	3373	Kota Salatiga	102,80
3315	Kab Grobogan	100,15	3374	Kota Semarang	104,61
3316	Kab Blora	100,03	3375	Kota Pekalongan	102,43
3317	Kab Rembang	103,47	3376	Kota Tegal	102,99
3318	Kab Pati	102,67			

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2022
Badan Pusat Statistik

Lampiran 10.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota
Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 (Kota Makasar=100)

Kode	Provinsi	IKK	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3301	Kab Cilacap	98,21	3319	Kab Kudus	103,82
3302	Kab Banyumas	97,20	3320	Kab Jepara	102,79
3303	Kab Purbalingga	96,36	3321	Kab Demak	102,86
3304	Kab Banjarnegara	98,54	3322	Kab Semarang	105,40
3305	Kab Kebumen	96,33	3323	Kab Temanggung	98,40
3306	Kab Purworejo	96,39	3324	Kab Kendal	100,18
3307	Kab Wonosobo	97,98	3325	Kab Batang	101,68
3308	Kab Magelang	97,34	3326	Kab Pekalongan	100,88
3309	Kab Boyolali	98,60	3327	Kab Pemasang	102,58
3310	Kab Klaten	97,74	3328	Kab Tegal	101,19
3311	Kab Sukoharjo	99,59	3329	Kab Brebes	102,18
3312	Kab Wonogiri	97,21	3371	Kota Magelang	98,63
3313	Kab Karanganyar	99,41	3372	Kota Surakarta	99,69
3314	Kab Sragen	97,77	3373	Kota Salatiga	102,59
3315	Kab Grobogan	101,87	3374	Kota Semarang	102,94
3316	Kab Blora	101,25	3375	Kota Pekalongan	101,54
3317	Kab Rembang	101,98	3376	Kota Tegal	103,15
3318	Kab Pati	103,48			

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2023
Badan Pusat Statistik

<https://wonosobokab.bps.go.id>

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**

Jl. Mayjend Bambang Sugeng km 2,2 Wonosobo

Telp. (0286) 324270, Fax. (0286) 3325380

Homepage : <http://wonosobokab.bps.go.id> E-mail : bps3307@bps.go.id